

**ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT DEFORESTASI
DAN HAK-HAK
MASYARAKAT ADAT HUTAN AMAZON DI BRAZIL**

Ali Sadikin

Universitas Hasanuddin, Makassar
Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar,
Email : alisadikin334@gmail.com

Marcel hendrapaty

Universitas Hasanuddin, Makassar
Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar,
Email : mhendrapati@yahoo.com

Judhariksawan

Universitas Hasanuddin, Makassar
Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar,
Email : judhariksawan@gmail.com3

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang analisis hukum internasional terkait deforestasi dan hak-hak masyarakat adat hutan amazon di brazil. menganalisis perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam menghadapi kebijakan presiden Bolsonaro dalam Hukum internasional serta kebijakan dan upaya negara-negara internasional dalam penanggulangan deforestasi di hutan amazon Brazil. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang- Undangan (*Rome Statute of the International Criminal Court*). Dimana upaya atau tindakan dalam perlindungan masyarakat adat hutan amazon Brazil dalam hukum internasional yaitu Melalui dukungan hukum internasional dengan memberikan sanksi atau kekerasan melalui intervensi dan penyelidikan penuntutan dari pihak komunitas internasional dan penyelidikan oleh Kantor Kejaksaan ICC akan menjadi kepentingan keadilan, kendala yang dihadapi dalam tuntutan ini adalah Mempertimbangkan prosedur panjang dan rumit yang ditetapkan oleh Konstitusi Brasil untuk menuntut Presiden Bolsonaro dan mengingat bahwa pengadilan belum melakukan langkah-langkah yang berkualitas untuk menjelaskan situasi saat ini, ada alasan untuk percaya bahwa jika Negara Brasil akan memulai penyelidikan, investigasi tidak akan memenuhi syarat sebagai 'asli'. Landasan kedua untuk dapat diterima adalah gravitasi tes, yang mengacu pada Pasal 17 (1) (d) dan Pasal 53 (1) Statuta Roma. Semua kejahatan di bawah yurisdiksi ICC adalah “kejahatan paling

serius” yang “mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia”. Kemudian dalam menekan pemerintah Brazil terkait deforestasi negara-negara akan membahas Proposal kebijakan perlindungan hutan amazon Brazil yang dicanangkan pada awal tahun 2021.

Kata Kunci: Hukum internasional, Hutan Amazon Brazil, Deforestasi, Masyarakat Adat

Abstract

This research examines the analysis of international law related to deforestation and the rights of indigenous Amazonian forests in Brazil. analyze the protection of the rights of indigenous peoples in the face of President Bolsonaro's policies in international law and the policies and efforts of international countries in tackling deforestation in the Brazilian Amazon forests. This research uses type normative juridical research using the approach Legislative - Invitation (Rome Statute of the International Criminal Court). Efforts or actions in the protection of Brazil's amazon forest indigenous peoples in international law, namely through the support of international law by providing sanctions or violence through interventions and prosecution investigations from the international community and investigations by the ICC Prosecutor's Office will be in the interests of justice, the obstacles faced in this lawsuit are to consider the long and complicated procedure established by the Brazilian Constitution to prosecute President Bolsonaro and given that the court has not undertaken quality steps to explain the current situation, there is reason to believe that if the Brazilian State were to initiate an investigation it would not qualify as ' genuine '. The second basis for acceptance is the gravity test, subject to Article 17 (1) (d) and Article 53 (1) of the Rome Statute. All crimes under the jurisdiction of the ICC are "the most serious crimes" that "threaten world peace, security and welfare". Then In asking the Brazilian government regarding deforestation, the countries will discuss the Brazilian Amazon Forest Protection Policy Proposal launched in early 2021.

Keywords: *International law, Brazilian Amazon Forest, Deforestation, Indigenous Peoples*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan Amazon Brazil adalah salah satu aset paling berharga di planet ini karena hutan hujannya yang lebat menutupi hampir 60% dari seluruh wilayah Brasil seluas 477.698.000 hektar, kurang dari 1.844.394 mil

persegi atau hanya di bawah 3 juta kilometer persegi.¹ Meliputi *Para, Amazonas, Maranhao, Goias, Mato Grosso, Acre, Amapa, Rondonia, Roraima.*²

Terlepas dari kewajibannya di bawah hukum nasional dan internasional, Hutan amazon Brazil Brasil telah menjadi korban dari proses deforestasi³ Menurut laporan Institusi Penelitian Antariksa Nasional Brasil sejak akhir 1970-an amazon Brazil telah kehilangan tutupan hutan sekitar 98.000 km persegi.⁴ dan pada tahun 1978 terjadi peningkatan dengan total area 15,2 juta hektar. Tahun 1990 sekitar 41,5 juta hektar, tahun 2000 sekitar 58,7 juta hektar, tahun 2001 sekitar 60,3 juta hektar.⁵ pada Januari 2003, Lula da Silva telah gagal menghentikan invasi ke di Bioma Amazon, Cerrado, dan Chaco yang menyebabkan sekitar 70.000 km² hutan hujan Amazon telah dihancurkan. melalui penebangan yang membuat Amazon lebih rentan terhadap kebakaran dan serangan oleh petani⁶ Mengakibatkan konsolidasi tanah dan konflik kekerasan di Hutan Amazon.⁷

Pada tahun 2017 Presiden Brazil Michel Temer mempresentasikan Rancangan Undang -undang (RUU) baru (Nomor 8.107 Tahun 2017) untuk menggantikan *Provisional Measure 756*. Yang secara drastis melemahkan undang-undang perlindungan hutan Nasional *Jamanxim* (Flona) di negara bagian *Para*. Dengan kata lain memberikan regulasi tanggung jawab pengolahan dan mendemoralisasi kebijakan publiknya sendiri untuk diberikan kepada mafia tanah dan kelompok pedesaan yang tertarik dalam eksplorasi di Amazon sehingga predator Amazon mendapatkan kekuasaan.⁸

¹Amelia Meyer, 2010, *Rainforests Of Brazil*, <https://www.brazil.org.za/rainforests-of-brazil.html>, di akses 29 agustus 2020

²Monica de Bolle, (2019),19-15 The Amazon Is^[SEP]a Carbon Bomb: How Can Brazil and the World Work Together to Avoid Setting It Off? <https://www.piie.com/sites/default/files/documents/pb19-15.pdf>. Di akses 8 juni 2020

³Thomas E. Lovejoy dan Carlos Nobre, 2019, *Amazon tipping point: Last chance for action*

[Amazon tipping point: Last chance for action | Science Advances \(sciencemag.org\)](https://www.sciencemag.org). di akses pada tanggal 8 juni 2020

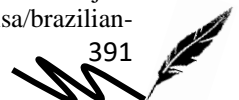
⁴Jean Pierre Ometto & Dkk, 2011, *Amazon deforestation in Brazil: e cts, drivers and challenges*, artikel future science. Hlm. 575

⁵Sergio Margulis, 2003, *Causes of deforestation of the Brazilian Amazon*, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, U.S.A. Hlm. 6

⁶Greenpeace, 2006, *Eating Up the Amazon*, greenpeace internasional, netherlands, Hlm. 5.

⁷le Polain de Waroux, Y, & dkk, (2020), *The Restructuring of South American Soy and Beef Production and Trade Under Changing Environmental Regulations* ,artikel Stanford university & boston university, hlm 189

⁸Giovana Leopoldi, 2017, *Brazilian environmentalists urge the Congress to reject Amazon deforestation new bill*, <https://amazon.org.br/en/imprensa/brazilian->



Pada awal Tahun 2019 ancaman bagi kelestarian hutan tropis Amazon kembali muncul setelah terpilihnya Jair Bolsonaro sebagai presiden dari sayap kanan yang tidak pro terhadap lingkungan hidup⁹ Dengan mengurangi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup sebesar 95% dari anggaran Kebijakan Nasional tentang Perubahan Iklim, 26% dari anggaran Program Manajemen, Pelaksanaan Konservasi Federal, 24% dari anggaran Program Inspeksi dan Kontrol Institut Lingkungan dan Sumber Daya Alam Terbarukan Brazil (IBAMA), Chico Mendes dan 20% dari Inspeksi Lingkungan, *Institute for Biodiversity Conservation* (ICMBio) dimana Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dari anggaran ICMBio bertanggung jawab atas 327 unit Konservasi Federal, yaitu sekitar 75,9 juta hektar lahan, dengan mengubah Pasal 21 Undang-Undang No. 13.844 Tahun 1988. Secara otomatis akan menghapus tanggung jawab atas demarkasi tanah masyarakat adat serta melemahkan institusi *National Indian Foundation* (FUNAI).¹⁰ Mengancam keanekaragaman hayati Brazil dan sumber daya lingkungan karena melemahnya Kebijakan Lingkungan Undang-Undang Nomor 6938 Tahun 1981. Dimana pemerintah Brazil saat ini dan para aktornya mengabaikan bukti scientik bidang kesehatan masyarakat, ilmu sosial, pendidikan klimatologi dan ilmu konservasi¹¹ mendorong otorisasi impor penggunaan 211 jenis produk pestisida dan 410 biosida yang penggunaannya dilarang di Uni Eropa serta memfasilitasi investasi infrastruktur pembangunan bendungan, jalan raya, pembangkit listrik tenaga air, yang berdampak negatif pada konservasi hutan.¹² Meningkatkan laju deforestasi di hutan amazon brazil. Menurut pemantauan Deforestasi Satelit dari Legal Amazon (PRODES), dari Institut Penelitian Antariksa Brasil (INPE), laju deforestasi tahun 2019 adalah 10.129 km², 34% lebih tinggi dari 2018. ¹³ Pada tahun 2020 terjadi peningkatan lebih lanjut sebesar 34%. Berdasarkan Sistem Deteksi Deforestasi Waktu Nyata

environmentalists-urge-the-congress-to-reject-Amazon-deforestation-new-bill/. di akses pada 2 juli 2020

⁹Cnn Indonesia, 2019, Presiden Brazil Tuduh Aktivistis Lingkungan Bakar Hutan Amazon. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190822115502134423695/presiden-brazil-tuduh-aktivis-lingkungan-bakar-hutan-Amazon>. Di akses pada 11 juli 2020

¹⁰ Johnson de Area Leão Pereira, E, & dkk, (2020), Brazilian policy and agribusiness damage the Amazon rainforest jurnal Institut Pendidikan Federal. hlm 2¹_{SEP}

¹¹ Magela Thomaz, S, & dkk (2019), *Opinion: The future of nature conservation in Brazil*, journal of Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. HL 1

¹²Johnson de Area Leão Pereira, E, & dkk, *Op Cit*, Hlm. 4

¹³INPE dan PRODES: Institut Riset Antariksa Nasional. PRODES: Pemantauan Satelit untuk Deforestasi Hutan Amazon Brasil. <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes> .di akses pada tanggal 11 juli 2020

(DETER) Brasil, INPE.¹⁴ Meningkatkan reaksi keprihatinan masyarakat adat dan aktivis lingkungan bahwa Pemerintah telah melanggar hak fundamental dari populasi yang tinggal di Amazon dan di seluruh Brazil, khususnya hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas tradisional.¹⁵

Retorika kekerasan Bolsonaro disertai dengan lonjakan kekerasan pedesaan,¹⁶ Menyebabkan Konflik kekerasan dan jumlah kematian masyarakat asli di Brazil meningkat 11% pada tahun 2019 dimana sekitar 87,5% masyarakat asli yang terbunuh dalam konflik perampasan lahan adat adalah para pemimpin Amazon. Keadaan itu menempatkan masyarakat adat pada risiko "etnosida" dan "genosida" .melanggar hak-hak masyarakat adat¹⁷ di bawah hukum internasional dan konstitusi.¹⁸ Mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, emisi gas rumah kaca, pembunuhan masyarakat asli dan penurunan budaya tradisional yang membawa negara itu ke "resesi terburuk dan perpecahan politik dalam satu generasi waktu yang menakutkan untuk mengendalikan sumber daya Amazon yang dilindungi oleh sebagian besar *Indigineous People* Brazil.¹⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian yuridis normatif Penelitian yuridis normatif adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.²⁰Penelitian ini dimulai dengan menginventarisasi peraturan-peraturan hukum internasional, khususnya yang berkenaan

¹⁴ INPE - Institut Nasional untuk Penelitian Luar Angkasa. Portal Terrabrasilis.. <http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/>. Di akses pada tanggal 11 juli 2020

¹⁵Christina braga, 2020, *Organisations take Brazilian government to the Supreme Court over deforestation and human rights abuses*. Executive Summary in Portuguese greenpeace document. Hlm 3

¹⁶ Olho nos Ruralistas, D, & dkk, (2019), *HOW NORTHERN CONSUMERS AND FINANCIERS*

ENABLE BOLSONARO'S ASSAULT ON THE BRAZILIAN AMAZON, laporan Amazon watch. Hlm 10

¹⁷Sue Branford , 2020, *NGOs charge Brazil's Bolsonaro with risk of indigenous 'genocide' at UN* <https://news.mongabay.com/2020/03/ngos-charge-brazils-bolsonaro-with-indigenous-genocide-at-un/>

di akses 12 juli 2020

¹⁸FAO organizational chart, (2020), *At home in the Amazon: Protecting biodiversity and livelihoods together* <http://www.fao.org/in-action/at-home-in-the-Amazon/en/> di akses 12 juli 2020

¹⁹ Conrado da Cruz, D & dkk, (2020), *An overview of forest loss and restoration in the Brazilian Amazon* link springer artikel, Hlm. 2

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, Hlm. 56.



dengan perlindungan Hukum lingkungan dan hak hak masyarakat adat seperti konvensi internasional, serta kebiasaan-kebiasaan hukum internasional yang berkaitan dengan isu dalam penelitian ini. Selanjutnya Sumber-sumber hukum internasional tersebut digunakan untuk menganalisis kasus dalam penelitian ini yaitu “ Kebijakan Presiden Bolsonaro terkait Perlindungan Hutan hujan Amazon dan hak hak masyarakat adat hutan Amazon di brazil. Adapun metode pengumpulan data dengan cara penelitian pustaka (*library research*), yaitu penulis mencari data-data, dan informasi melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur, atau peraturan perundang-undangan yang yang mengulas tentang deforestasi dan Hak-hak masyarakat adat Hutan amazon di brazil. Dalam penelitian hukum normatif, alat pengumpulan data yang dipergunakan melalui penelusuran dan atau studi kepustakaan agar memperoleh data sekunder yang diperlukan.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat hutan Amazon dalam menghadapi kebijakan Presiden Bolsonaro berdasarkan hukum internasional

Masyarakat adat adalah pewaris dan praktisi budaya dan cara unik berhubungan dengan manusia dan lingkungan dalam mempertahankan karakteristik sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berbeda dari masyarakat dominan tempat mereka tinggal. Menurut Jose R. Martinez Cobo “Komunitas adat, masyarakat adat dan bangsa adalah mereka yang, memiliki kesinambungan sejarah dengan masyarakat pra-invasi dan pra-kolonial yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari sektor masyarakat lain yang sekarang berlaku di wilayah tersebut, atau bagian dari mereka yang terbentuk pada sektor masyarakat non-dominan saat ini dan bertekad untuk melestarikan, mengembangkan dan mewariskan wilayah leluhur kepada generasi yang akan datang, sebagai dasar keberlangsungan hidup, identitas etnis, bangsa, pola budaya, sosial. institusi, dan sistem hukum.²¹

Secara individual, masyarakat adat adalah orang yang termasuk dalam penduduk asli, melalui identifikasi diri sebagai penduduk asli mempertahankan hak kedaulatan dan kekuasaan bagi komunitas untuk memutuskan siapa yang menjadi milik mereka, tanpa campur tangan

²¹Cultural survival, 2004, addressing indigeneous rights at the united nation, <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/addressing-indigenous-rights-united-nations>. di akses pada tanggal 7 january 2021

eksternal.²² bahwa tindakan khusus diperlukan untuk melindungi budaya, hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan.

Pada KTT Iklim PBB di New York pada September 2019, masyarakat adat membutuhkan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celcius.²³ namun COP25 ke-25 yang diselenggarakan di Madrid, dianggap mengecewakan oleh banyak aktor masyarakat sipil, serta masyarakat adat untuk implementasi Perjanjian Paris, termasuk meningkatkan ambisi untuk mengekang emisi gas rumah kaca.

Dalam kasus REDD+ misalnya praktik mata pencaharian tradisional Masyarakat Adat masih dipandang sebagai salah satu pemicu deforestasi. Instrumen kebijakan dan inisiatif lain yang berupaya untuk memitigasi perubahan iklim cenderung dikembangkan dengan tergesa-gesa tanpa atau hanya partisipasi yang sangat terbatas dari Penduduk Asli dan kepedulian terhadap hak-hak mereka. Sudah terdokumentasi dengan baik bagaimana aksi mitigasi top down seperti proyek energi terbarukan atau REDD+ dapat menyebabkan perpindahan dan pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat jika tidak mematuhi standar hak internasional seperti UNDRIP dan Konvensi ILO 169.²⁴

Namun dalam beberapa kasus di negara bagian di Amazon Brasil, Kebijakan desentralisasi kehutanan yang terburu-buru baru-baru ini dari federal tanpa memperhatikan masalah tata kelola yang lemah di wilayah tersebut, memiliki implikasi penting yang dapat merusak keberhasilan REDD +. Tata kelola yang lemah tercermin dalam ketidakcukupan kapasitas kelembagaan untuk penegakan norma-norma lingkungan, serta dalam penangkapan manfaat elit dan kurangnya transparansi mengenai hasil program tersebut di sinilah hak-hak masyarakat adat secara historis di kompromikan.²⁵

Di bawah Konstitusi Brazil tahun 1988, hak-hak masyarakat adat dilindungi secara eksplisit namun seringkali undang-undang yang berlaku diabaikan.²⁶ Ketika Brasil semakin menjadi sorotan ekonomi, mengakibatkan tuntutan untuk asimilasi kelompok adat dan adanya desakan peraturan perundang-undangan yang membatasi wilayah mereka. Tuntutan

²² UNITED NATION, 2020, *Indigenous Peoples at the United Nations*, di akses pada tanggal 8 January 2021

²³ Dwayne Mamo, *The Indigenous World 2020*, the Danish Ministry of Foreign Affairs (DANIDA), Copenhagen Denmark, 2020, Hlm.6

²⁴ Dwayne Mamo, *Ibid*, Hlm. 8-9

²⁵ Peter H. May & dkk, 2011, *The context of REDD+ in Brazil: Drivers, agents and institutions*. Center for International Forestry Research, Cifor, Bogor Indonesia, Hlm.26

²⁶ Indian law, (unknown), *Indigenous Peoples in Brazil and the Amazon*. <https://indianlaw.org/brazil>, di akses pada tanggal 11 februari 2021



ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak masyarakat adat.²⁷

Dalam wawancara, Bolsonaro menghukum masyarakat adat karena malas, dan tidak memberikan kontribusi apa pun yang membangun bagi masyarakat luas.²⁸ Meskipun Bolsonaro menerima reaksi keras atas komentar tumpulnya selama kampanyenya ia mampu menarik pendukung targetnya secara efektif yaitu petani dan penambang dengan menyerukan perintah eksekutif, yang diratifikasi oleh Kongres untuk mentransfer regulasi dan pembentukan cadangan asli FUNAI dan MAPA ke kementerian pertanian Brasil.²⁹

Bolsonaro berulang kali mengutip perbedaan populasi dan luas lahan sebagai pembenaran untuk pengurangan wilayah adat. Kurang dari satu juta orang tinggal di daerah terpencil di Brazil, pada kenyataannya, mereka dieksploitasi dan dimanipulasi oleh organisasi non-pemerintah.³⁰ Meskipun benar bahwa penduduk asli hanya berjumlah kurang dari satu persen dari penduduk Brasil, wilayah lindung ini masih dimiliki oleh 900.000 warga dan 305 suku unik.³¹ Selain itu, janji presiden untuk "mengintegrasikan" warga untuk mendapatkan akses ke tanah mereka untuk produksi ekonomi menimbulkan ingatan tentang asimilasi paksa masyarakat adat yang terjadi saat ini selama junta militer tahun 1970-an dan 1980-an; Selama ini, tanah leluhur mereka digunakan untuk ekstraksi mineral dan pertanian.³²

Hukum Brasil tentang hak-hak masyarakat adat

Dengan kembalinya demokrasi pada tahun 1988 dari junta militer, Brasil mengesahkan Konstitusi baru, di mana penduduk asli diberikan hak kepemilikan asli atas tanah leluhur mereka dan pemerintah berjanji untuk melindungi hak kelompok adat atas wilayah mereka sendiri dengan konsep ketatanegaraan yang baru, masyarakat adat dijamin akan menghormati

²⁷Dom Phillips, 2019, "Jair Bolsonaro Launches Assault on Amazon Rainforest Protections," *The Guardian*, <https://www.theguardian.com/world/2019/jan/02/brazil-jair-bolsonaro-amazon-rainforest-protections>. Di akses pada 9 January 2021

²⁸Dom Phillips, *Ibid.*

²⁹Dom Phillips, *Ibid.*

³⁰Ernesto Londoño, 2019, "Jair Bolsonaro, on Day 1, Undermines Indigenous Brazilians' Rights," *The New York Times*, <https://www.nytimes.com/2019/01/02/world/americas/brazil-bolsonaro-president-indigenous-lands.html>. Di akses pada tanggal 9 Januari 2021

³¹"Brazilian Indians, 2001-2021" *Survival International*, n.d., <https://www.survivalinternational.org/tribes/brazilian>. Di akses pada tanggal 9 Januari 2021

³²Londano, 2019, *Jair Bolsonaro, on Day 1, Undermines Indigenous Brazilians' Rights*, the new York time, <https://www.nytimes.com/2019/01/02/world/americas/brazil-bolsonaro-president-indigenous-lands.html>. Di akses pada tanggal 10 Januari 2021

organisasi, sosial, kepercayaan dan tradisi. ³³ Dimana Legislasi domestik Brasil mengakui pentingnya menjamin hak-hak masyarakat adat, budaya dan tanah mereka.

Menetapkan hak atas lingkungan yang sehat dan seimbang secara ekologis dan menetapkan bahwa pemerintah Brasil dan masyarakat secara keseluruhan memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dalam Pasal 225 Konstitusi Brasil.³⁴ Selain itu, paragraf 4 Pasal 225 mengakui Amazon Brasil sebagai bagian dari warisan nasional Brasil, dan Pasal 170 mengakui perlindungan lingkungan sebagai prinsip umum kegiatan ekonomi. Beberapa undang-undang nasional, seperti UU 12.187 tahun 2009 tentang Kebijakan Nasional Perubahan Iklim atau UU 12651 tahun 2012 tentang Kode Kehutanan semakin mengembangkan ketentuan konstitusional Hak-hak masyarakat adat diatur dalam Bab VIII Konstitusi Brasil. Mengenai hak atas tanah³⁵

Perlindungan Hak-hak masyarakat adat Hutan amazon dalam Hukum internasional

Melalui dukungan hukum internasional dengan memberikan sanksi atau kekerasan Mungkin satu-satunya cara untuk melindungi komunitas adat Amazon melalui intervensi dan penyelidikan penuntutan dari kekerasan selama ini dalam kurun waktu yang sangat rentan.³⁶ Lebih jauh lagi, realitas kekerasan terhadap masyarakat adat Brasil dengan jelas menggambarkan kebutuhan untuk tindakan segera dari pihak komunitas internasional dan menunjukkan bahwa penyelidikan oleh Kantor Kejaksaan ICC akan menjadi kepentingan keadilan.³⁷

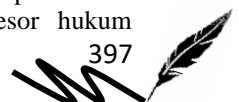
³³Constitutional Rights of the Indigenous People, unknown” *Instituto Socioambiental*, n.d., <https://pib.socioambiental.org/en/Constitution>. Di akses pada tanggal 10 januari 2021

³⁴ Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Article 225
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

³⁵CONSTITUTION OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 1988 3rd Edition, Article 231.Hlm.153

³⁶ Brazil wires, 2020, *Bolsonaro in the Hague: President faces third denunciation for “genocide and crimes against humanity*, <https://www.brasilwire.com/bolsonaro-in-the-hague-charges-filed-over-coronavirus-response/>.Di akses pada tanggal 5 february 2021

³⁷Statuta Roma, supra catatan 20, art. 53 (“Dalam memutuskan apakah akan memulaipenyelidikan, Jaksa Penuntut harus mempertimbangkan apakah ... [t] mempertimbangkan beratnya kejahatan dan kepentingan para korban, tetap ada alasan kuat untuk meyakini bahwa penyelidikan tidak akan bermanfaat bagi kepentingan keadilan. ”). Fakta-fakta yang dikemukakan di Bagian ini mendukung temuan bahwa kekerasan terhadap masyarakat adat Brasil cukup berat untuk menjamin penuntutan ICC. Lihat supra Bagian I. Selain itu, sifat serangan yang sedang berlangsung dan kurangnya pemulihan melalui sistem peradilan pidana nasional Brasil menunjukkan bahwa intervensi ICC akan menjadi kepentingan para korban. Lihat Cowie, supra catatan 10; Lihat juga Phillips, supra catatan 23 (menyampaikan bahwa Eloísa Machado, anggota CADHu dan profesor hukum



Mekanisme ICC yang memungkinkan penuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan genosida Meskipun ancaman serius terhadap kehidupan dan kebebasan yang ditimbulkan oleh degradasi lingkungan dalam iklim yang memanas serta³⁸perusakan lingkungan secara langsung hanya disebutkan sekali sebagai kejahatan menurut Statuta Roma.³⁹ Berdasarkan Pasal 8 (2) (b) (iv) Statuta Roma, adalah kejahatan perang untuk “dengan sengaja meluncurkan serangan karena mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kerusakan luas, jangka panjang, dan parah terhadap lingkungan alam yang jelas-jelas berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer konkrit dan langsung secara keseluruhan yang diantisipasi.”⁴⁰

Maraknya kasus kejahatan terhadap masyarakat adat di Hutan Hujan Amazon⁴¹ merupakan bukti dari Kegagalan Bolsonaro yang disengaja untuk mengambil tindakan dari penolakan pemerintah untuk menuntut kekerasan terhadap masyarakat adat.⁴² Bolsonaro bahkan dengan sengaja gagal mengambil tindakan untuk mengakhiri invasi ke tanah adat, ia juga melangkah lebih jauh untuk melanjutkan kebijakannya dalam mempromosikan serangan terhadap masyarakat adat dengan memotong dana untuk lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan

konstitusional di Getúlio Vargas São Paulo, menyatakan: “Sistem peradilan [Brasil] tidak mampu melakukan penyelidikan yang independen dan tidak memihak terhadap Presiden Jair Messias Bolsonaro.”).

³⁸United States Environmental Protection Agency, 2017, *Climate Impacts on Human Health*, https://19january2017snapshot.epa.gov/climate-impacts/climate-impacts-human-health_.html, di akses pada tanggal 5 february 2021.

³⁹ Statuta Roma, supra catatan 20, art. 8 (2) (iv).

⁴⁰ Lily Grisafi, 2020, *PROSECUTING INTERNATIONALENVIRONMENTAL CRIME COMMITTED*, thesis Columbia Law School, Hlm. 40
AGAINST INDIGENOUS PEOPLES IN BRAZIL Hlm.40

⁴¹Sam cowie, 2019, *JAIR BOLSONARO PRAISED THE GENOCIDE OF INDIGENOUS PEOPLE. NOW HE'S EMBOLDENING ATTACKERS OF BRAZIL'S AMAZONIAN COMMUNITIES*, <https://theintercept.com/2019/02/16/brazil-bolsonaro-indigenous-land/>, (“armed bands of land grabbers, known as ‘grileiros,’ have been staging attacks on Indigenous communities a pattern of violence that has surged in the wake of Bolsonaro’s election.”). <https://perma.cc/M39B-MT8C>. di akses pada tanggal 10 february 2021

⁴²Mafia Hutan Hujan: Bagaimana Kekerasan dan Impunitas Menyulut Deforestasi di Amazon Brasil, HUMAN RIGHTS WATCH, <https://www.hrw.org/report/2019/09/17/rainforest-mafias/how-kekerasan-dan-impunitas-bahan-bakar-deforestasi-brazils-amazon> [<https://perma.cc/T2FC-Z25L>] ; Lihat juga Sam Cowie, 'Penjaga Hutan' Brasil Dibunuh oleh Penebang Liar dalam Penyergapan, GUARDIAN (2 November 2019), <https://www.theguardian.com/world/2019/nov/02/brazilian-forest-guardian-killedoleh-illegal-loggers-in-penyergapan> [<https://perma.cc/PX38-CT9K>] (“Dari 157 pembunuhan akibat konflik tanah dinegara bagian Maranhão ... hanya lima kasus yang dibawa ke pengadilan.”).

masyarakat adat dan perlindungan lingkungan.⁴³dimana Presiden Bolsonaro terus mendorong serangan terhadap masyarakat adat dan wilayah mereka pada tahun 2020, baru-baru ini mendukung RUU yang akan mendekriminalisasi penambangan di tanah adat yang dilindungi dan menyatakan niat untuk mengubah undang-undang perlindungan lingkungan saat ini untuk memungkinkan pertanian komersial skala besar di wilayah adat. ⁴⁴ dimana Presiden Bolsonaro terus mendorong serangan terhadap masyarakat adat dan wilayah mereka pada tahun 2020, baru-baru ini mendukung RUU yang akan mendekriminalisasi penambangan di tanah adat yang dilindungi dan menyatakan niat untuk mengubah undang-undang perlindungan lingkungan saat ini untuk memungkinkan pertanian komersial skala besar di wilayah adat. ⁴⁵

Di bawah proposal ini, masyarakat adat tidak memiliki hak untuk memveto proyek yang merusak lingkungan setelah disahkan oleh pemerintahan Bolsonaro. ⁴⁶Selain kebijakan anti-adat yang eksplisit ini, Bolsonaro telah secara jelas dan terbuka menyatakan niatnya untuk melemahkan hak-hak masyarakat adat. ⁴⁷Bolsonaro mengatakan bahwa perlindungan untuk wilayah adat adalah "melumpuhkan agribisnis" ⁴⁸ dan

⁴³J.p linstroth, 2019, *Preventing Brazilian Indigenous Genocide and Protecting the Amazon*, <https://www.counterpunch.org/2019/01/07/preventing-brazilian-indigenous-genocide-and-protecting-the-amazon/>. Di akses pada tanggal 12 february 2021

⁴⁴ Eduardo goulart de Andrade dkk, 2020, *Brazil sees record number of bids to mine illegally on Indigenous lands*, <https://news.mongabay.com/2020/11/brazil-sees-record-number-of-bids-to-mine-illegally-on-indigenous-lands/#:~:text=Brazil's%20mining%20authority%20is%20actively,the%20InfoAmazonia%20project%20has%20found.> Di akses pada tanggal 12 february 2021lihat juga State of the World's Indigenous Peoples, https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/en/SOWIP_web.pdf. Hlm 98-99.

⁴⁵ Eduardo goulart de Andrade dkk, 2020, *Brazil sees record number of bids to mine illegally on Indigenous lands*, <https://news.mongabay.com/2020/11/brazil-sees-record-number-of-bids-to-mine-illegally-on-indigenous-lands/#:~:text=Brazil's%20mining%20authority%20is%20actively,the%20InfoAmazonia%20project%20has%20found.> Di akses pada tanggal 12 february 2021lihat juga State of the World's Indigenous Peoples, https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/en/SOWIP_web.pdf. Hlm 98-99.

⁴⁶FHC Foundation auditorium, 2020, *Indigenous Peoples Rights: An Obstacle to Development or Part of the National Wealth?*, <https://medium.com/funda%C3%A7%C3%A3o-fhc/indigenous-peoples-rights-an-obstacle-to-development-or-part-of-the-national-wealth-2b24a7cd5b3c>, di akses pada tanggal 12 february 2021

⁴⁷Survival intyernational, 2019, *What Brazil's President, Jair Bolsonaro, has said about Brazil's Indigenous Peoples*, <https://www.survivalinternational.org/articles/3540-Bolsonaro>, di akses pada tanggal 12 february 2021

⁴⁸Antonio Marques e Leonardo Rocha, 2015 - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS,*Bolsonaro diz que OAB só defende bandido e reserva indígena é um crime*,



demarkasi wilayah adat adalah kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi.⁴⁹ Bolsonaro menyatakan bahwa dia akan “memberikan senapan dan izin membawa senjata api kepada setiap petani ⁵⁰dan peternak menunjukkan bahwa penjajah memiliki izin untuk menggunakan kekerasan untuk mengeluarkan masyarakat adat dari wilayah adat *Raposa Serra do Sol*⁵¹ kebijakan Negara tersebut telah mendukung penghancuran tanah adat dan kekerasan terhadap masyarakat adat. Selain itu para pendukung Bolsonaro menyadari kebijakan ini dan secara aktif berusaha untuk mencapai tujuannya.⁵² Dengan demikian, kejahatan yang dilakukan terhadap masyarakat adat di Amazon Brazil jelas sesuai dengan persyaratan untuk dianggap sebagai serangan terhadap penduduk sipil berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma.⁵³ Kedua, perusakan tanah adat yang dilindungi di Brazil juga memenuhi mens rea persyaratan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai tindakan kekerasan individu terhadap masyarakat adat yang

<https://www.campograndenews.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-oab-so-defende-bandido-e-reserva-indigena-e-um-crime>. [https://perma.cc/JN55-LLLG]. Di akses pada tanggal 12 february 2021

⁴⁹Marcelo Godoy, 2017, ‘*Sem tiro de advertência: primeiro na testa*’ na *testa*’ <https://infograficos.estadao.com.br/politica/bolsonaro-um-fantasma-ronda-o-planalto/entrevista>, di akses pada tanggal 12 february 2021

⁵⁰Sam Cowie, 2019, *JAIR BOLSONARO PRAISED THE GENOCIDE OF INDIGENOUS PEOPLE. NOW HE’S EMBOLDENING ATTACKERS OF BRAZIL’S AMAZONIAN COMMUNITIES*, <https://lbfromlv.wordpress.com/2019/02/16/jair-bolsonaro-praised-the-genocide-of-indigenous-people-now-hes-emboldening-attackers-of-brazils-amazonian-communities-sam-cowie-february-16-2019-431-a-m/>. di akses pada tanggal 12 february 2021

⁵¹ Survival international, 2019, *What Brazil’s President, Jair Bolsonaro, has said about Brazil’s Indigenous Peoples*, <https://www.survivalinternational.org/articles/3540-Bolsonaro>. Di akses pada tanggal 12 february 2021 lihat juga Youtube, 2016, Jair Bolsonaro manda um recado para Roraima <https://youtu.be/jUgDXVbPHZs>. Di akses pada tanggal 12 february 2021

⁵² Joana Moncau e Thais Lazzeri, Repórter Brasil, 2019, *Brasil: Indígenas e indigenistas relatam ameaças a indígenas e suas terras, e mais ataques pós-eleição de Bolsonaro e desmonte da Fund. Nac. do Índio*, <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/brasil-ind%C3%ADgenas-e-indigenistas-relatam-amea%C3%A7as-a-ind%C3%ADgenas-e-suas-terras-e-mais-ataques-p%C3%B3s-elei%C3%A7%C3%A3o-de-bolsonaro-e-desmonte-da-fund-nac-do-%C3%ADndio/>. Lihat juga *VIOLENCE AGAINST INDIGENOUS PEOPLES IN BRAZIL*, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OgjFmRukK9EJ:https://www.hrw.org/report/2019/09/17/rainforest-mafias/how-violence-and-impunity-fuel-deforestation-brazils-amazon+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d>. di akses pada tanggal 12 february 2021.

⁵³Statute roma, supra note 20, artikel. 7.

dilakukan dengan tindakan penghasutan.⁵⁴ Bahkan sifat serangan terhadap masyarakat adat memiliki mandat di bawah presiden Bolsonaro.⁵⁵

Induksi tersebut dilakukan melalui penerbitan kebijakan negara secara sukarela yang bertujuan untuk mengurangi perlindungan atas tanah adat, memfasilitasi kehancurannya, dan melalui pernyataan yang menghilangkan komunitas adat. Selain itu, mengetahui bahwa masyarakat adat Brazil selalu dalam bahaya dan selalu mengalami ancaman dan agresi oleh grileiros, Presiden Brazil diduga sadar bahwa ketika menerapkan kebijakan tersebut, pemusnahan dan pemindahan paksa penduduk asli akan “terjadi dalam peristiwa biasa”.⁵⁶ Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mengantisipasi bahwa mengurangi perlindungan masyarakat adat dan tanah mereka serta memfasilitasi dilakukannya kegiatan ilegal, dapat mengakibatkan peningkatan risiko bagi masyarakat adat untuk dimusnahkan dan dipindahkan secara paksa.⁵⁷ Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 30 (3) Statuta Roma, dugaan kejahatan dilakukan dengan sepengetahuan karena Presiden Brasil sadar dan sadar akan tindakannya dan kemungkinan akibatnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Presiden Brasil mendorong dilakukannya dugaan kejahatan pemusnahan dan pemindahan paksa dengan maksud dan pengetahuan yang disyaratkan dalam Pasal 30 Statuta Roma.

Kebijakan dan inisiatif Negara-negara dalam penanggulangan deforestasi di hutan hujan Amazon brazil

Pada September 2019, dalam pertemuan yang diadakan di bawah naungan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, donor internasional setuju untuk memberikan negara-negara Amazon melalui *Development Bank for American latin*(LAC), dengan hibah US \$ 500 juta untuk memerangi kesiapsiagaan kebakaran hutan dan deforestasi di hutan amazon brazil. melalui sejumlah perjanjian dan konvensi Persatuan Bangsa-bangsa

⁵⁴ Sam cowie, 2019, *Jair Bolsonaro Praised the Genocide of Indigenous People. Now He's Emboldening Attackers of Brazil's Amazonian Communities*, <https://theintercept.com/2019/02/16/brazil-bolsonaro-indigenous-land/>, *Sob ataque pós-eleição, terras indígenas estão desprotegidas com desmonte da Funai*. <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/586597-sob-ataque-pos-eleicao-terras-indigenas-estao-desprotegidas-com-desmonte-da-funai>. Di akses pada tanggal 12 february 2021

⁵⁵ Clariza beretz, 2019, *Bolsonaro Helping to Fuel Explosion of Violence Against Indigenous Peoples in Brazil | Common Dreams Views*, <https://www.commondreams.org/views/2019/10/19/bolsonaro-helping-fuel-explosion-violence-against-indigenous-peoples-brazil>. Di akses pada tanggal 12 february 2021.

⁵⁶ Statuta Roma (n 12) Pasal 30 (2).

⁵⁷ Pengadilan Pidana Internasional, *Jaksa v. Lubanga*, No. ICC-01 / 04-01 / 06-2482, Putusan berdasarkan Pasal 74 Statuta, Sidang Pengadilan I, 14 Maret 2012, paragraf 1012. https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_08627.PDF



membahas masalah konservasi dan pengelolaan hutan, yang didasarkan pada 'Deklarasi Rio' tentang Lingkungan dan Pembangunan, yang diadopsi oleh Konferensi Lingkungan dan Pembangunan PBB tahun 1992, yang diadakan di Brasil. Tiga konvensi yang terkait dengan 'Deklarasi Rio' secara bersamaan dibuka untuk ditandatangani: Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), dan Konvensi untuk Penggurunan Perang (CCD).⁵⁸

Instrumen selanjutnya adalah: Pernyataan Prinsip-Prinsip Otoritatif yang Tidak Mengikat Secara Hukum untuk Konsensus Global tentang Pengelolaan, Konservasi, dan SDGs dari Semua Jenis Hutan (Prinsip Hutan);⁵⁹ Bab 11 dari Agenda 21⁶⁰ dan proposal tindakan yang disematkan dalam daftar panjang panel dan resolusi. Secara khusus, diskusi seputar Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Pasca-2020.⁶¹ dan Beberapa negara seperti Norwegia, Jerman dan Inggris memberikan bantuan bilateral kepada Brazil; bantuan ini menjadi semakin penting dalam menghadapi sikap anti-konservasi alam pemerintah federal. memberikan dukungan yang sangat berharga, termasuk pendanaan untuk *'Madeira É Legal'* ('Wood is Legal'), untuk mendorong industri konstruksi terbesar Brazil untuk mengambil kayu secara bertanggung jawab di bawah kebijakan internasional.⁶²

Aspek penting lainnya dari komitmen Uni Eropa untuk mengekang deforestasi adalah Rencana Aksi Penegakan Hukum Kehutanan tahun 2003

⁵⁸Sustainable development goals, 2015, *Major Agreements & Conventions*. Major Agreements & Conventions ∴ Sustainable Development Knowledge Platform (un.org). lihat juga *Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim?*, *What is the United Nations Framework Convention on Climate Change?* | UNFCCC. di akses pada tanggal 16 february 2021

⁵⁹Resolusi Majelis Umum 70/199, instrumen yang tidak mengikat secara hukum pada semua jenis hutan diubah namanya menjadi instrumen hutan Perserikatan Bangsa-Bangsa. https://www.un.org/esa/forests/wpcontent/uploads/2015/06/capacity_development_module.pdf. di akses pada tanggal 17 february 2021

⁶⁰Laporan Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, Riode Janeiro, 3 14 Juni 1992, vol. I. A_CONF-151_26_Rev-1(Vol-I)-AR.pdf. <https://digitallibrary.un.org/record/160453?ln=en>. Di akses pada tanggal 17 february 2021

⁶¹'United Nations Forest Instrument', https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2018/08/UN_Forest_Instrument.pdf. Di akses pada tanggal 17 february 2021

⁶²COM, 2019, 352, Communication from the Commission on 'Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forests'. <https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vl0ffuc9oout>. Di akses pada tanggal 17 february 2021

dan Perdagangan (FLEGT).⁶³, dan bagian utama dari undang-undang yang diturunkan dari itu, Peraturan FLEGT⁶⁴

Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Mercosur memberikan kesempatan untuk menghidupkan kembali percakapan tentang FLEGT, dengan fokus yang lebih besar pada pertukaran teknologi, dan menangani masalah yang terkait dengan konsumsi deforestasi, serta efisiensi yang lebih besar dalam praktik penebangan dan penggunaan kayu di wilayah hutan Brazil, dan negara lain di kawasan Amazon menerima dukungan dari FLEGT untuk sejumlah proyek⁶⁵

Desakan Uni Eropa pada ketentuan keberlanjutan dalam Kesepakatan memenuhi harapan publiknya sendiri, dan menunjukkan koherensi dengan investasi blok di forum multilateral seperti UNFCCC dan pembiayaan lingkungan di bawah lembaga *Bretton Woods*. Namun, kuncinya adalah bahwa UE mampu menunjukkan komitmennya untuk mengkonsolidasikan persyaratan lingkungan yang diterapkan di dalam wilayahnya sendiri, yaitu 'garis merah' yang telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian harus menghormati prinsip timbal balik meskipun deklarasi baru-baru ini tampaknya bertentangan dengan komitmen pemerintah Brazil terhadap perjanjian lingkungan internasional.

Sikap arrogansi pemerintahan Bolsonaro yang bertentangan dengan lingkungan internasional meningkatkan inisiatif dan kebijakan parlemen Eropa akan tekanan terhadap pemerintah Brazil terkait deforestasi, yang akan dicanangkan pada awal tahun 2021 dimana Uni Eropa akan mulai membahas Proposal kebijakan perlindungan hutan Amazon Brazil yang ditujukan terutama bagi pelaku usaha kedelai dan daging sapi karena dua produk utama tersebut yang dijual oleh Brasil ke Eropa, Persyaratan yang sama juga berlaku untuk perusahaan Eropa yang datang untuk menginvestasikan uang di Brasil seperti bank dan dana investasi dimana

⁶³Council Regulation (EC) No2173 / 2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang pembentukan skema lisensi FLEGT untuk impor kayu ke dalam Masyarakat Eropa. <https://www.legislation.gov.uk/eur/2005/2173/contents>. Di akses pada tanggal 17 february 2021

⁶⁴ COUNCIL REGULATION (EC) No 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R2173>. Di akses pada tanggal 17 february 2021

⁶⁵ Peta interaktif proyek FLEGT, [http://www.flegt.org/map-of-projects/](http://www.flegt.org/map-of-projects/#countries/BRA) ; <http://www.flegt.org/map-of-projects/>. Di akses pada tanggal 18 february 2021

kebijakan tersebut harus membuktikan bahwa produk mereka dibuat tanpa berkontribusi pada penghancuran hutan amazon Brazil.⁶⁶

KESIMPULAN

Dari bukti yang ada, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan orang di Brazil mengikuti apa yang dikatakan Presiden Bolsonaro, karena ada impunitas dari kegiatan ilegal di suaka adat dan di sahkannya *Provisional Measure* No 870 Tahun 2019 mereformasi *National Indian Foundation* (FUNAI) dengan memotong salah satu fungsi terpenting FUNAI yang ditujukan untuk memfasilitasi perusakan masyarakat adat dan mengurangi kompetensi kekuasaan beberapa lembaga lingkungan *Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade* (ICMBio) dan IBAMA.

Akibatnya tindakan Presiden Brasil telah membahayakan kelangsungan hidup masyarakat adat dan tanah mereka dengan meningkatkan risiko menjadi sasaran kejahatan pemusnahan dan pemindahan paksa. Bentuk-bentuk kontribusi lain yang ditetapkan dalam Pasal 25 (3) (d) Statuta Roma mengacu pada kontribusi "untuk melakukan atau mencoba melakukan kejahatan semacam itu oleh sekelompok orang yang bertindak dengan tujuan yang sama". Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 30 (3) Statuta Roma, dugaan kejahatan dilakukan dengan sepengetahuannya karena Presiden Brasil sadar akan tindakannya akibatnya dapat disimpulkan bahwa Presiden Brasil mendorong dilakukannya dugaan kejahatan pemusnahan dan pemindahan paksa dengan maksud dan pengetahuan yang disyaratkan dalam Pasal 30 Statuta Roma.

Tekanan Negara-negara internasional dari seluruh dunia banyak juga yang menyatakan akan mengambil tindakan preventif dan intervensi hukum internasional untuk menghentikan rencana pemerintah bolsonaro apalagi masyarakat internasional juga bisa melakukan sesuatu yang lebih baik untuk tidak membeli daging sapi, produk kedelai dan kayu yang berasal dari Amazon Brazil dan periksa apakah ditebang secara legal agar kita bisa bersama-sama menyelamatkan hutan hujan Amazon brazil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sergio Margulis, 2003, Causes of deforestation of the Brazilian Amazon, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, U.S.A. Hlm. 6

⁶⁶Andre shalder, BBC BRAZIL, 2020, *A norma do Parlamento Europeu que pode aumentar a pressão contra o desmatamento no Brasil*<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55168713>. Di akses pada tanggal 19 february 2021

- Greenpeace, 2006, Eating Up the Amazon, greenpeace internasional, netherlands, Hlm. 5.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, Hlm. 56.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm 67
- Dwayne Mamo, The Indigenous World 2020, the Danish Ministry of Foreign Affairs (DANIDA), copenhagen denmark , 2020, Hlm.6
- Peter H. May & dkk, 2011, The context of REDD+ in Brazil: Drivers, agents and institutions. Center for International Forestry Research, Cifor, Bogor Indonesia, Hlm.26
- United Nations (UN).2015 Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development; 70th Session of the General Assembly .(A/Res/70/1); UN: New York, NY, USA, Hlm. 35
- Anja eikerman, 2015, forest in international law, Is There Really a Need for an International Forest Convention?.(Springer International Publishing, AG Switzerland). Hlm. 1-2

Jurnal

- Johnson de Area Leão Pereira, E, & dkk, (2020), Brazilian policy and agribusiness damage the Amazon rainforest jurnal Institut Pendidikan Federal. hlm 2_{SEP}
- Magela Thomaz, S, & dkk (2019), Opinion: The future of nature conservation in Brazil , journal of Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. HL 1

Artikel

- Amelia Meyer, 2010, Rainforests Of Brazil, <https://www.brazil.org.za/rainforests-of-brazil.html>. di akses 29 agustus 2020
- Monica de Bolle, (2019),19-15 The Amazon Is_{SEP}a Carbon Bomb: How Can Brazil and the World Work Together to Avoid Setting It Off? <https://www.piie.com/sites/default/files/documents/pb19-15.pdf>. Di akses 8 juni 2020
- Thomas E. Lovejoy dan Carlos Nobre, 2019, Amazon tipping point: Last chance for action Amazon tipping point: Last chance for action | Science Advances (sciencemag.org). di akses pada tanggal 8 juni 2020
- Jean Pierre Ometto & Dkk, 2011, Amazon deforestation in Brazil: e cts, drivers and challenges, artikel future science. Hlm. 575

le Polain de Waroux, Y, & dkk, (2020), The Restructuring of South American Soy and Beef Production and Trade Under Changing Environmental Regulations ,artikel Stanford university & boston university, hlm 189

Giovana Leopoldi, 2017, Brazilian environmentalists urge the Congress to reject Amazon deforestation new bill, <https://amazon.org.br/en/imprensa/brazilian-environmentalists-urge-the-congress-to-reject-Amazon-deforestation-new-bill/>. di akses pada 2 juli 2020